PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

MEAKORAH: THE LANGUAGE OF MEDIATION IN CONFLICTS OVER TRADITIONAL MINING IN THE JADDIH LIMESTONE HILLS AND THEIR IMPACT ON THE SOCIAL AND ECOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE PARSEH VILLAGE COMMUNITY IN SOCAH SUBDISTRICT, BANGKALAN REGENCY

Maharani Puspita Dewi[1], Yuliana Windi Sari[2], Alfan Biroli[3]
[1]Maharani Puspita Dewi, maharanipuspitadewi29@gmail.com
[2]Yuliana Windi Sari, yuliana.sari@trunojoyo.ac.id
[3]Alfan Biroli, alfan.biroli@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the dynamics of traditional mining conflicts at Bukit Kapur Jaddih within the social and ecological environment of the Parseh Village community, Socah District, Bangkalan Regency. The conflict arises from differences in interests among mine owners, mine workers, village government, and communities affected by mining activities. This study uses qualitative methods with a case study approach. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. The results show that mining conflicts consist of non-realistic conflicts characterized by disappointment, tension, anger, and frustration of the community due to mining impacts, and realistic conflicts caused by differences in interests regarding limestone utilization, mining legality, compensation, and environmental improvement. Conflict is reduced through safety valve mechanisms such as village mediation, Karang Taruna, and social religious activities. Mining activities have ecological implications including reduced vegetation, dust pollution, and road damage, while also providing economic benefits through employment and MSME development.

Key Words: *Conflict, Traditional Mining, Social Environment, Ecological*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik pertambangan tradisional di Bukit Kapur Jaddih dalam konteks lingkungan sosial dan ekologi masyarakat Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Konflik tersebut timbul akibat perbedaan kepentingan di antara pemilik tambang, pekerja tambang, pemerintah desa, dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan terdiri dari konflik non-realistis yang ditandai dengan kekecewaan, ketegangan, kemarahan, dan frustrasi masyarakat akibat dampak pertambangan, serta konflik realistis yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan terkait pemanfaatan batu kapur, legalitas

paramasastra
Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya
PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

pertambangan, kompensasi, dan perbaikan lingkungan. Konflik dapat dikurangi melalui mekanisme pelepas tekanan seperti mediasi desa, Karang Taruna, dan kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan pertambangan memiliki dampak ekologis, termasuk berkurangnya tutupan vegetasi, polusi debu, dan kerusakan jalan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

Kata Kunci: *Konflik, Pertambangan Tradisional, Lingkungan Sosial, Ekologi*

PENDAHULUAN

Indonesia negara yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sektor pertambangan yang berkembang pesat, salah satunya adalah pertambangan batu kapur yang ada di Desa Parseh bahan galian seperti batu, kerikil, dan pasir yang hampir terdapat di setiap daerah di Indonesia. Kegiatan pertambangan batu kapur memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Namun, Kegiatan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang menjadi perhatian publik dan dirasakan oleh masyarakat. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan karena memiliki dampak besar terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat (Suhariyanto, 2023).

Pertambangan Tradisional Batu Kapur di Desa Parseh merupakan pertambangan yang masih dilaksanakan secara tradisional, dengan metode sederhana, manual dan penggunaan peralatan yang belum didukung oleh teknologi modern maupun sistem mekanisasi yang memadai, alat-alat yang digunakan seperti, cangkul, pahat dan martil (palu) sehingga menjadikannya sebagai pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Pertambangan tradisional ini masih dikuasai oleh warga lokal dan secara turun temurun (Azizah, 2020). Praktik pertambangan tradisional ini belum mengutamakan aspek keamanan *(Safety)* secara optimal, ditandai dengan kurangnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), kurangnya pemeliharaan alat berat, dan tidak tersedianya prosedur keselamatan yang standar. Sebagian besar

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

pelaku penambangan merupakan masyarakat lokal yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan teknis, maupun keterampilan manajemen yang memadai untuk mendukung praktik pertambangan yang aman dan efisien.

Aktivitas Pertambangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara dan air, serta gangguan Kesehatan Masyarakat. Aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menciptakan lereng-lereng curam yang membahayakan keselamatan para pekerja maupun Masyarakat sekitar, meningkatkan polusi udara akibat debu tambang, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan akibat tingginya frekuensi transportasi hasil tambang (Rohmatika, 2024). Selain itu, juga turut berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat, antara lain pergeseran pola mata pencaharian, perubahan struktur kelas, serta timbulnya kriminalitas, kekerasan dan diskriminasi (Fauzi, 2024).

Kajian Penyelesaian konflik Pertambangan penting untuk dikaji secara sosiologis khususnya dari segi konflik, Lingkungan & Budaya, karena tidak hanya mencerminkan dampak lingkungan dan sosial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal berdaya dalam menghadapi risiko dengan mengandalkan menjaga solidaritas, membagi peran kerja, hingga mengelola hasil tambang secara kolektif yang memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari aktivitas tambang melalui usaha kolektif yang berkelanjutan. (Fauzi, 2024)

PEMBAHASAN

Aktivitas pertambangan batu kapur di kawasan ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Menurut sejarah bukit kapur merupakan bunker bekas peninggalan belanda yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata dan kemudian menjadi lokasi penambangan batu kapur yang masih standar dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dalam skala menengah sejak tahun 1970 yang masih aktif hingga sekarang.

Pada tahun 2013 pertambangan mulai dikelola dengan aktif secara intensif dengan mulai melibatkan banyak masyarakat tidak hanya para pekerja tetapi juga UMKM yang asli masyarakat Desa Parseh. Dan mulai melakukan pengajuan legalitas pengoperasian pertambangan dalam bentuk badan hukum tingkat Desa,

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

Kabupaten/kota dan Provinsi hingga saat ini belum benar-benar 100% mendapatkan surat izin resmi legalitas pertambangan. Kawasan yang semula didominasi lahan pertanian dan perbukitan kapur secara bertahap mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan pertambangan dan kemudian berkembang sebagai destinasi wisata. Pertambangan batu kapur di Bukit Jaddih diketahui telah lama menjadi aktivitas ekonomi masyarakat dan memanfaatkan potensi batu kapur yang melimpah di kawasan tersebut (Rohmatika, 2024).

a. Bentuk Konflik Non Realistik

Konflik pertambangan tradisional di Bukit Kapur Jaddih mulai muncul ketika aktivitas pertambangan berkembang semakin intensif dan mulai memengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini meliputi pemilik tambang, pekerja tambang, masyarakat sekitar yang terdampak, serta pemerintah Desa Parseh sebagai pihak yang berupaya melakukan mediasi dan penyelesaian konflik.

Menurut Lewis A. Coser, konflik Non Realistik merupakan konflik yang muncul dari ketegangan, rasa kecewa, kemarahan, atau frustrasi yang terakumulasi dalam hubungan sosial, bukan semata-mata karena tujuan tertentu. Tampak pada reaksi emosional yang muncul sebelum adanya tuntutan atau tujuan yang jelas (Coser, 1956).

> *"awalah njjek bak ngkok bik kluarga sabiasa lok pateh egressah dampak en jiah, gen 2020 jeh baru buruh egressah, gen jiah ngkk pas lok nyaman lok pateh lebur, polanah se alakoh kapor joh bak, kan tang roma Semak bik tambang, cek benyak en kadik truk, pikep, goh abunah dek man kamman dele tepeggeh bik kek matah, apa pole mon le ngobber kapor neng tomang rajah ruah abboh kuak en celleng dek sekabbinah roma, cek lok nyamanah bak".*
>
> (wawancara dengan Mas Jufri, Minggu 24 Mei 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Dampak yang dirasakan berupa polusi debu, asap pembakaran batu kapur, serta kerusakan jalan di sekitar tempat tinggal dimana konflik pertambangan

paramasastra
Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya
PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

tersebut terjadi sehingga masyarakat menggunakan Bahasa madura dalam menggambarkan dampak dari konflik yang dihadapi sehari-hari.

Konflik Non Realistik muncul sebagai bentuk pelampiasan ketegangan sosial dan emosional yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, konflik Non Realistik terlihat dari adanya rasa kecewa, marah dan frustrasi masyarakat terhadap dampak aktivitas pertambangan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana tindakan menyalahkan petugas tambang dan kemudian diarahkan kepada pemerintah desa dapat dipahami sebagai bentuk pelampiasan ketegangan dan frustrasi yang dirasakan akibat dampak pertambangan terhadap lahan pertaniannya.

b. Bentuk Konflik Realistik

Konflik realistik biasanya terjadi karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jika tujuan itu berhasil diraih, maka konflik bisa mereda atau bahkan hilang. Konflik bersifat realistis jika semua pihak menyadari dan mengakui adanya perbedaan kepentingan secara terbuka. Dengan begitu, perbedaan itu bisa dibicarakan dan dinegosiasikan, bukan ditutupi atau ditekan (Coser, 1956).



"ngkok toman atokar bik petugseh juah, ye polanah tang lahan tani deri alm tang mbok ekeneng tambangah ruah, se nangguy lat alat rajah ye ekeneng, petugseh lok mau tau sang bik ngkk etegor, ye pas aprotes langsung dek pak ebunah, kan pak ebunah kiah se aberik izin".

(wawancara dengan Bapak Abdussalam, Senin 18 Mei 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kerugian oleh aktivitas pertambangan karena lahan pertanian mengalami penurunan kualitas dan sebagian terdampak aktivitas pengerukan tambang. Rasa kecewa dan kemarahan yang muncul kemudian

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

diarahkan kepada petugas tambang dan pemerintah desa yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Konflik pertambangan tradisional di Bukit Kapur Jaddih merupakan konflik yang berkembang secara berkelanjutan dan diwariskan secara turun menurun dari waktu ke waktu karena akar permasalahannya belum terselesaikan secara menyeluruh, konflik pertambangan yang terjadi menjadi representasi dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat memiliki mekanisme, cara untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tidak melibatkan penyelesaian dengan unsur kekerasan.

Konflik Realistik memiliki tujuan yang jelas, sehingga lebih mudah diarahkan untuk mencari solusi. Artinya, konflik ini secara keseluruhan dapat diselesaikan secara baik karena para pihak yang terlibat memahami apa yang ingin dicapai. Konflik ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap kekecewaan yang nyata pada suatu kondisi atau pihak tertentu, contohnya dalam bentuk Demonstrasi, protes, perdebatan, maupun perkelahian (Coser, 1956).

Menurut Lewis A. Coser (Coser, 1956). Konflik Realistik muncul karena adanya pertentangan kepentingan yang nyata antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini, masyarakat terdampak menginginkan lingkungan yang aman dan sehat, sedangkan petugas tambang berusaha mempertahankan aktivitas pertambangan sebagai sumber penghasilan. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong munculnya protes, pengaduan, dan tuntutan kepada pemerintah desa maupun aparat penegak hukum.

Konflik yang terjadi pada pertambangan tradisional bukit kapur jaddih merupakan konflik realistik karena dilandasi dengan pertentangan kepentingan yang nyata antara kelompok pro tambang dan kelompok kontra tambang. Konflik tersebut tidak hanya berupa perdebatan dan protes, tetapi juga diwujudkan melalui pengaduan kepada pemerintah desa dan aparat kepolisian dengan tujuan memperoleh solusi terhadap permasalahan lingkungan, keselamatan, serta legalitas aktivitas pertambangan.

Konflik pertambangan tradisional di Bukit Jaddih terjadi dengan dengan dua model yaitu konflik realistic yang berdasarkan pada kepentingan yang berbeda antara kelompok yang mendukung keberadaan pertambangan dan kelompok yang menolak

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

keberadaan pertambangan. Penyelesaian konflik tersebut juga berkaitan dengan keterlibatan *stakeholder* dan instansi pemerintahan seperti pemerintah desa dan aparat penegak hukum.

Teori Konflik Budaya Sekunder *(Secondary Conflict)*

Teori konflik budaya sekunder merupakan konflik yang terjadi karena adanya pertentangan norma, nilai dalam budaya yang mengakibatkan konflik. Teori Konflik Budaya sekunder merupakan pemikiran dari Thorsten Sellin yang menjelaskan bahwa substansi budaya yang berbeda dapat menjadi penyebab konflik. Konflik yang muncul karena adanya norma dan budaya tunggal kemudian terjadi proses industrialisasi sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat karena munculnya sub budaya baru yang berakibat pada benturan kebudayaan yang berakibat pada perkembangan budaya yang semakin kompleks. (Sellin, 1938)

Pada konteks penyelesaian konflik *(Meakorah)* pertambangan tradisional ini berakar dari proses industrialisasi dimana masyarakat belum siap dengan situasi dan kondisi ini, sehingga menimbulkan gejolak-gejolak konflik dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat. Hal yang menarik pada konflik budaya sekunder ini dapat diselesaikan melalui mekanisme dan penyelesaian konflik (*Meakorah)* melalui forum-forum informal seperti pengajian, acara maulid nabi. Konflik budaya sekunder yang terjadi pada masyarakat juga dapat terselesaikan karena adanya persamaan Bahasa khususnya Bahasa madura sebagai dialog lokal yang digunakan oleh masyarakat etnis madura.

c. Katup Pengaman *Safety Valve* Dalam Dinamika Konflik

Konsep Teori *(safety valve)* ini menjelaskan bahwa konflik dan ketegangan sosial membutuhkan suatu mekanisme penyaluran agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang merusak. Katup pengaman berfungsi sebagai jalan alternatif untuk meredakan ketegangan ketika gesekan antara kelompok atau individu mulai meningkat. Melalui mekanisme ini, kelompok dapat menjaga keutuhan dan mencegah pecahnya konflik besar. Orang bisa menyalurkan perasaan tidak senangnya lewat cara-cara seperti humor, sindiran, atau kegiatan kompetitif seperti lomba dan pertandingan (Coser, 1956).

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

Katup pengaman ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah tetapi bisa meredakan ketegangan antar kelompok, dengan membiarkan menyalurkan, meluapkan, dan menyampaikan bentuk aspirasi setiap individu maupun kelompok (Coser, 1956). Selain itu, katup pengaman juga merupakan sebuah lembaga atau cara untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap sebuah sistem atau struktur sosial. Coser mengatakan bahwa lewat katup pengaman, permusuhan bisa dikendalikan agar tidak membalikkan menyerang akar masalah yang sebenarnya.

1. **Saluran Formal**

Saluran formal dilakukan melalui pemerintah Desa Parseh sebagai pihak yang memfasilitasi mediasi antara masyarakat terdampak dan pelaku usaha tambang. Mediasi dilakukan melalui musyawarah desa, pertemuan masyarakat, dan penyampaian aspirasi kepada kepala desa terkait dampak aktivitas pertambangan. Ini adalah katup pengaman yang paling jelas. Forum ini menjadi wadah untuk "curhat" dan menuntut pertanggungjawaban, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan anarkis. Proses ini mengubah energi permusuhan menjadi dialog, meskipun mungkin dialog yang bersifat intens dengan menggunakan Bahasa madura sebagai Bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat, proses mediasi terjadi karena adanya persamaan latar belakang, identitas budaya dan persamaan Bahasa untuk memaknai dan mencari Solusi atas konflik yang terjadi.



"waktu proses mediasi itu sangat tegang dek, saya kan juga ikut ya, masyarakat itu menuntut beberapa kesepakatan ke yang terlibat di tambang, sempet melalui proses perdebatan juga yang pada akhirnya disetujui sama ketiga belah pihak"
(wawancara dengan Mas Hakimin, Minggu 18 Mei 2026).

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi antara masyarakat, pihak tambang, dan pemerintah desa berlangsung dalam suasana yang cukup tegang karena adanya perbedaan kepentingan.

2. **Saluran Informal**

Selain melalui jalur formal, penyelesaian konflik juga dilakukan secara informal melalui komunikasi antarwarga, tokoh masyarakat, dan pendekatan kekeluargaan. Saluran informal dianggap efektif dalam menjaga hubungan sosial masyarakat karena dilakukan secara lebih terbuka dan bersifat kekeluargaan. Saluran informal adalah Ruang-ruang Publik (Warung Kopi, Pengajian, Media Sosial dan lain sebagainya). Ini adalah tempat di mana warga bisa mengeluh, bergosip, atau bahkan melontarkan sindiran tentang pihak lain. Meskipun terlihat negatif, aktivitas ini berfungsi sebagai cara untuk melepaskan unek-unek dan frustrasi dalam skala kecil, sehingga tekanan emosional tidak menumpuk hingga menjadi ledakan besar. Di warung kopi atau pertemuan warga.

d. Implikasi Ekologis Konflik Pertambangan Tradisional

Aktivitas pertambangan tradisional telah memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan di Desa Parseh. Perubahan tersebut terlihat pada perubahan vegetasi akibat aktivitas pengerukan sehingga berdampak pada polusi debu yang mengganggu aktivitas sehari-hari membuat ketidaknyamanan pada kesehatan masyarakat, dan Penururnan Kualitas Infrastruktur Jalan dengan banyak bebatuan dan jalan yang berlobang akibat lalu lalang alat-alat berat dikhawatirkan berpotensi membahayakan keselamatan warga khususnya yang rumahnya berada di sekitar area tambang. Berikut perubahan kondisi lingkungan fisik akibat aktivitas pertambangan batu kapur (Qomariyah, 2025).

1. **Perubahan Vegetasi**

Jenis vegetasi di kawasan Bukit Kapur Jaddih terdapat pohon akasia, pohon palm, rumput, dan semak belukar. Berdasarkan hasil survei jenis vegetasi di kawasan Bukit Kapur Jaddih sejak tahun 1987 hingga tahun 2018 didominasi oleh pohon akasia, rumput dan pohon jati. Jenis vegetasi pada lahan yang telah ditambang yang

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

pada awalnya pohon akasia, rumput dan pohon jati menjadi semak belukar. Hal ini disebabkan oleh para pekerja tambang, pengelola tambang dan juga masyarakat Desa Parseh, yang belum mempunyai kesadaran dalam menanam kembali vegetasi pada lahan yang telah ditambang, yang menjadikan semak belukar tumbuh secara alami. Namun sejak menjadikan pengelola tambang yang juga sebagai pengelola wisata, pekerja tambang, dan masyarakat Desa Parseh sadar akan pentingnya vegetasi di lahan yang telah ditambang (Zalzabila, 2018).

> *"saonggunah magih kuleh lok pateh nyaman skaleh lek, bik polusinah riah, ken ye deremmah pole le resiko lelakonah tambang, ye le koduh tremah kiah jek gebey ekonomi"*
> Sebenarnya saya juga tidak terlalu nyaman sama polusinya tapi ya bagaimana lagi sudah resiko kerja tambang, saya terima saja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
> (wawancara dengan bapak Ilyas, senin 18 Mei 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Parseh menyadari adanya dampak negatif dari aktivitas pertambangan tradisional, seperti gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, ia menganggap kondisi tersebut sebagai konsekuensi yang sulit dihindari karena aktivitas pertambangan masih bersifat tradisional dan belum memiliki legalitas yang memadai.

2. **Penurunan Kualitas Infrastruktur Jalan**

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian zona darat, termasuk bangunan pelengkap jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas. Aktivitas pertambangan tradisional di Bukit Kapur Jaddih tidak hanya berdampak terhadap kondisi Ekologis perubahan vegetasi saja, tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas infrastruktur jalan di Desa Parseh. Kondisi jalan yang baik akan memberikan rasa aman, nyaman, dan memperlancar aktivitas masyarakat. Sebaliknya, jalan yang mengalami kerusakan dapat menghambat mobilitas serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

> *"jelen jeh lambek nyaman, setiah le benyak se bullong, benyak betonah derinah se elebeten tok"*

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

> Jalan ini dulu enak, sekarang sudah banyak yang berlubang, banyak batunya karena banyak yang berlalu-lalang kendaraan bermuatan berat
>
> (Wawancara dengan Mas Jufri, Minggu 24 Mei 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya penurunan kualitas infrastruktur jalan sejak aktivitas pertambangan berkembang di Bukit Kapur Jaddih. Jalan yang sebelumnya dalam kondisi baik kini mengalami kerusakan berupa permukaan yang berlubang dan tidak rata akibat tingginya intensitas kendaraan pengangkut hasil tambang. Kondisi tersebut mengurangi kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan jalan untuk beraktivitas sehari-hari.

e. Implikasi pada Lingkungan Sosial (Pergeseran Mata Pencaharian)

Aktivitas pertambangan tradisional di Bukit Kapur Jaddih telah membawa perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Parseh, salah satunya berupa pergeseran mata pencaharian. Sebelum aktivitas pertambangan berkembang, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, meningkatnya aktivitas penambangan batu kapur membuka peluang kerja baru sebagai penambang, sopir truk, kernet, *checker*, pemecah batu, hingga pengelola kawasan wisata Bukit Jaddih. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat beralih dari sektor pertanian ke sektor pertambangan karena dianggap mampu memberikan pendapatan yang lebih cepat dan relatif lebih tinggi.

> “dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, jumlah masyarakat yang beraktivitas di kawasan bukit kapur jaddih sejak tahun 2013 itu sebanyak 42 Jiwa dik, sampai tahun 2026 itu ada 70 Jiwa, didominasi sama pekerja tambangnya itu dik”
> (Wawancara dengan Bapak Ilyas, Senin 18 Mei 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bekerja di kawasan Bukit Kapur Jaddih terus meningkat dari 42 orang pada tahun 2013 menjadi 70 orang pada tahun 2026, dengan mayoritas bekerja sebagai pekerja tambang. Hal ini menandakan bahwa aktivitas pertambangan telah membuka lapangan kerja baru dan mendorong pergeseran mata pencaharian masyarakat menuju sektor pertambangan.

KESIMPULAN

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Konflik Pertambangan Tradisional Di Bukit Kapur Jaddih Pada Lingkungan Sosial Masyarakat Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, terdapat kesimpulan bahwa Aktivitas pertambangan memberikan implikasi Lingkungan masyarakat Desa Parseh, dari aspek Lingkungan Ekologis, terjadi perubahan vegetasi, peningkatan polusi debu, dan kerusakan infrastruktur jalan. Dari aspek Lingkungan sosial, terjadi pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor pertambangan. Sementara itu pertambangan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong berkembangnya UMKM. Berdasarkan aspek linguistik konflik pertambangan yang terjadi diketahui bahwa Bahasa madura merupakan Bahasa yang menjadi sarana komunikasi sosial masyarakat dalam penyelesaian konflik, resolusi konflik pada masyarakat terjadi karena didukung adanya persamaan budaya, identitas sosial dan cara hidup hingga persamaan Bahasa dalam penyelesaian konflik selain itu juga terdapat nilai tradisi dan nilai keagamaan yang menjadi konsensus pada penyelesaian konflik pertambangan tradisional di Bukit Jeddih.

Dengan demikian, konflik pertambangan tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi juga menghasilkan fungsi positif melalui mekanisme *Safety Valve* sebagai sarana meredakan ketegangan sosial dan konflik yang mampu memperkuat hubungan sosial masyarakat dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat dengan identitas sosial dan budaya yang memiliki karakteristik sama.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwibowo, S. (2007). *Ekologi Manusia.* Bogor: Fakultas Ekologi Manusia (IPB).

Azizah, N. (2020). Dampak Pertambangan Tradisional dan Modern Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus : Di Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandaling Natal). *Skripsi*, 01-91.

Coser, L. (1956). *The Functions of Social Conflict.* Amerika Serikat: The Free Press.

Fauzi, R. M. (2024). Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues In Indonesia. *Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 6 Nomor 1*, 34-41.

Qomariyah, L. (2025). *Polusi Udara.* Yogyakarya: CV Diandra Primamitra Media.

PARAMASASTRA
Vol. 13 No. 2 - September 2026
p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754
http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra

Rohmatika, F. (2024). Legalitas Pengoperasian Pertambangan Dalam Bentuk Badan Hukum dan Pengalihfungsian Lahan Sebagai Tempat Pariwisata Bukit Jaddih (Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan). *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2*, 63-67.

Sudarmanto, G. (2025). *Analisis Dampak Lingkungan Ekologi.* Jawa Tengah: CV Wawasan Ilmu.

Suhariyanto, N. J. (2023). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara di PT. Gea Lestari Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Melalui Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. *UNJA Journal Of LegalStudies, Volume 01 Nomor 02*, 197-216.

Zalzabila, A. (2018). Perubahan Pemanfaatan Ruang Lahan Pertambangan Menjadi Kegiatan Pariwisata Di Kawasan Bukit Kapur Jaddih Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. *Brawijaya Knowledge Garden*, 1-153.

Sellin, T. (1938). *Culture conflict and crime*. Social Science Research Council.